

ABSTRAK

Kasus perceraian di Indonesia kembali meningkat di tahun 2019 mencapai 480.618 kasus, khususnya di kalangan umat Islam. Sejak 2015, jumlah ini meningkat setiap tahun. Menurut data terbaru, hingga awal September 2022 terdapat 4.500 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember. Delapan puluh persen di antaranya adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri, dan dua puluh persen sisanya diajukan oleh suami. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi perempuan yang mayoritas mengajukan tuntutan hukum disebabkan oleh faktor ekonomi. Selain itu, kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksepakatan adalah beberapa pembenaran lain untuk perceraian. Anak menjadi korban atas perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Hak-hak anak cenderung tidak terpenuhi apabila orang tuanya bercerai. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian yuridis normatif. beberapa aspek yang dapat dilakukan agar anak mendapatkan hak-haknya seperti yang tertera pada Undang-Undang no.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan aspek Litigasi dan Non Litigasi. Sehingga untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, pembentukan lembaga yang fokus dalam pembayaran nafkah anak, dan pelibatan kerabat ayah dalam pemberian nafkah.

Keywords: Hak Anak, Pasca Perceraian



ABSTRACT

Divorce cases in Indonesia increased again in 2019 reaching 480,618 cases, especially among Muslims. Since 2015, this number is increasing every year. According to the latest data, as of early September 2022, there were 4,500 divorce cases filed with the Jember Regency Religious Court (PA). Eighty percent of them are divorce applications filed by the wife, and the remaining twenty percent are filed by the husband. Most of the problems faced by women, the majority of whom file lawsuits, are caused by economic factors. In addition, the presence of third parties, domestic violence, and disagreements are some other justifications for divorce. Children become victims of divorce that occurs between their parents. Children's rights tend not to be fulfilled if their parents divorce. This research uses the method of statutory approach and conceptual approach, with normative juridical research type. several aspects that can be done so that children get their rights as stated in Law no.35 of 2014 Regarding Amendments to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, namely with Litigation and Non-Litigation applications. So as to ensure the fulfillment of child support after divorce can be done with binding rules related to the payment of child support, the establishment of institutions that focus on paying child support, and the involvement of paternal relatives in providing bread.

Keywords: *Child Rights, Post Divorce*

